

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTAYASA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

Chamid Sutikno

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

*Korespondensi : c.sutikno@unupurwokerto.ac.id

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan suatu bentuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong secara bersyarat dalam keluarga miskin berupa bantuan sosial sebagai wujud upaya perlindungan social. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia secara umum memiliki tujuan terhadap permasalahan kemiskinan yang terus berkembang yang secara bertahap dapat menurunkan dan mengatasi angka kemiskinan yang terjadi dimasyarakat. Tujuan dari penelitian ini dilakukan ialah untuk menganalisis dan memastikan proses evaluasi pelaksanaan program keluarga di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif secara deskriptif yang dapat mendeskripsikan masalah dalam sebuah penelitian melalui jawaban dari masalah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ditetapkan. Dapat terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas oleh pendamping PKH, koordinator PKH dan kelompok masyarakat mulai dari pertemuan, pencairan, pemutakhiran data sampai dengan verifikasi komitmen dan terhadap Program keluarga harapan. Secara umum dengan adanya program perlindungan sosial ini yang ditujukan pada level keluarga dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih minim perolehan penghasilan. Namun perlu adanya pelatihan dan sosialisai mengenai edukasi pemanfaatan bantuan program keluarga harapan untuk membangun kesejahteraan ekonomi secara mandiri tanpa ketergantungan selalu dengan bantuan pemerintah.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

The Family Hope Program is a form of program issued by the government to people who are conditionally classified as poor families in the form of social assistance as a form of social protection efforts for the community in meeting the needs of a decent life. The implementation of the Family Hope Program in Indonesia in general has a goal of developing poverty problems which can gradually reduce and overcome the poverty rate that occurs in the community. The purpose of this research is to analyze and ensure the process of evaluating the implementation of family programs in Kotayasa Village, Sumbang District, Banyumas Regency. This study uses a descriptive qualitative approach

that can describe problems in a study through the answers to these problems. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. To test the validity of the data, researchers used a source triangulation technique, namely by checking the data that had been obtained through several sources. From the results of observations and analysis carried out the implementation of the Family Hope Program can run in accordance with the established regulations and procedures. This can be seen from the various activities carried out in Kotayasa Village, Sumbang District, Banyumas Regency by PKH Facilitators, PKH Coordinators and community groups starting from meetings, disbursing, updating data to verifying commitments and towards the Family Hope Program. In general, the existence of this social protection program aimed at the family level can help meet the needs of people who still have minimal income. However, there is a need for training and socialization regarding education on the use of assistance from the Family Hope program to build economic prosperity independently without always being dependent on government assistance.

Keywords : *Implementation, Policy, Family Hope Program*

A. PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan menjadi salah satu aspek yang penting dalam melihat suatu dampak keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program kebijakan (Lang, Jing & Yin, Runsheng. 2019). Evaluasi kebijakan bukan hanya sekedar proses untuk menilai dan melihat dampak keberhasilan dari suatu program, akan tetapi melihat bagaimana semua proses program kebijakan di laksanakan secara komperhensif. (Derrick and White, P. 2020). Suatu program dapat berhasil melalui berbagai langkah yang dikembangkan melalui bentuk kegiatan yang direncanakan secara sistematis yang memberikan warna dampak perubahan bagi masyarakat. untuk mengetahui proses program yang dilakukan dapat diketahui secara dini yaitu melalui proses evaluasi yang sangat berpengaruh bagi berbagai kegiatan yang terkandung dalam program pemerintah mengenai suatu permasalahan yang terjadi (Babatunde, Binoyo. 2019). Proses evaluasi dapat dijadikan sebagai suatu upaya pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan

yang terjadi seiring dengan pelaksanaan program yang telah diimplementasikan dimasyarakat dalam mewujudkan pencapaian tujuan dari program (Aiafi, Patoae Roberts, 2020) . Berbagai informasi dan fakta dapat ditemukan dengan adanya proses evaluasi dari hasil pelaksanaan program sehingga dengan adanya proses evaluasi secara umum dapat mengambil keputusan untuk menentukan langkah dan menganalisis data yang ada untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan kemudahan dan langkah sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan pada program pemerintah kepada masyarakat (Aiafi, Patoae Roberts, 2020).

Proses evaluasi program merupakan salah satu bentuk program yang diperuntukan dalam mengidentifikasi, mengamati dan menganalisis data yang ditemukan melalui hasil pelaksanaan program yang telah diimplementasikan sebelumnya dimasyarakat. Adapun tujuan dari proses evaluasi yaitu untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan yang ada dimasyarakat secara efektif dan

efisien yaitu dengan melalui pengidentifikasian berbagai kegiatan yang sudah direncanakan dan diterapkan dalam bidang permasalahan kehidupan masyarakat (Korankye, Alex Adde. 2019). Kemiskinan menjadi salah satu bidang yang difokuskan yang belum bisa dapat teratasi secara maksimal oleh pemerintah walupun dengan berbagai kebijakan ataupun program yang telah dilakukan dan direncanakan secara aktif dimasyarakat (Kwong, Yan Wai. 2019). Kemiskinan menjadi persoalan yang sangat rumit dan kompleks seiring dengan terus berkembangnya permasalahan ini dan terlahir besar dan kompleks yang dialami oleh masyarakat. Adanya permasalahan yang terbilang besar secara umum memperlambat kemajuan negara dalam berbagai bidang dan masyarakat secara khusus tidak dapat mencapai pada titik kesejahteraan secara merata.

Permasalahan kemiskinan terjadi benar-benar bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diselesaikan secara sendiri namun dapat dikategorisasikan ke

dalam suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi dengan berbagai pihak dan mampu mendorong serta membantu dalam memecahkan permasalahan tersebut. Negara Indonesia dalam situasi seperti ini, pengendalian ataupun penanganan yang dilakukan belum bisa berdampak signifikan dalam menuntaskan kemiskinan yang tersebar diberbagai daerah. Faktor-faktor lain juga sebagai pendorong laju garis kemiskinan yang berkembang seperti peningkatan penduduk, lapangan pekerjaan yang semakin rendah dan pemenuhan kebutuhan yang semakin susah. Hal ini secara tidak langsung menghambat dari program yang dilaksanakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Berbagai kesulitan yang ada membuktikan betapa sulitnya dan kompleknya permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dalam sektor sosial kehidupan manusia. Berikut disajikan mengenai tabel angka jumlah penduduk miskin di negara Indonesia yang terjadi dari tahun 2018 – 2020.

Tabel. 1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 - 2020

Bulan dan Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	% Jumlah Penduduk
Maret (2018)	25,95	9,82
Maret (2019)	25,14	9,41
Maret (2020)	26,42	9,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen.

Sedangkan pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dan pada Maret 2020 jumlah

penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen (Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2019). Kemiskinan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banyumas yang mendapat julukan sebagai Kota Satria, dijuluki sebagai Kota Satria

karena kota ini memiliki banyak pahlawan nasional. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel mengenai keadaan kemiskinan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2018 – 2020, berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.

Tabel. 2 Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	366 442	226,20	13,50
2019	385 140	211,60	12,53
2020	406 250	225,80	13,26

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Informasi yang dapat diketahui melalui tabel tersebut ialah masalah kemiskinan yang terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Banyumas berjumlah 226,20 ribu atau 13,50 persen. Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas masalah kemiskinan mengalami penurunan, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 211,60 ribu atau 12,53 persen. Namun pada tahun 2020 Kabupaten Banyumas mengenai kemiskinan mengalami kenaikan yang terbilang tinggi mencapai 225,80 ribu atau 13,26 persen (Banyumas, 2021). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 225,80 (ribu) atau sekitar 13,26 %. Sedangkan Kabupaten Brebes adalah sebesar 308,78 (ribu) atau sekitar 17,03%. Dengan Jumlah kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas berada dalam kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua setelah Kabupaten Brebes. Adanya

kenaikan tingkat jumlah penduduk miskin di kabupaten banyumas tentu dipengaruhi dengan adanya berbagai faktor yang memicu berkembangnya kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Faktor tersebut muncul disebabkan adanya bencana pandemi Covid- 19 pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas sehingga menimbulkan dampak bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Hal ini memungkinkan masyarakat menjadi susah dan sulit untuk mencapai pada titik kesejahteraan masyarakat seiring dengan penghasilan yang semakin rendah dalam memenuhi segala kebutuhan dari masing-masing keluarga.

Kecamatan Sumbang menjadi salah satu kecamatan termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan tingkat penduduk miskin yang terbilang tinggi dan menjadi kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya menerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH).

Salahsatu desa yang termasuk dalam Kecamatan Sumbang yang memiliki tingkat angka penduduk miskin dan paling banyak menerima manfaat dari program PKH adalah Desa Kotayasa. Desa Kotayasa merupakan desa yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Sumbang yang sebagian besar penduduknya sampai saat ini banyak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 1082 KPM di

tahun 2022. Dengan dimulainya program PKH yang diimplementasikan di Desa Kotayasa sejak tahun 2013-2018, tingkat angka kemiskinan di desa tersebut tergolong tinggi diantara desa-desa lainnya di Kecamatan Sumbang, dikarenakan program PKH yang ada belum dapat berjalan secara optimal di masyarakat. Berikut disajikan data mengenai jumlah penerima PKH yang ada di Kecamatan Sumbang Tahun 2022.

Tabel. 3 Jumlah penerima PKH di Kecamatan Sumbang Tahun 2022

No.	Desa	Jumlah Penerima KPM
1.	Banjarsari Kulon	332
2.	Banjarsari Weta	262
3.	Banteran	680
4.	Datar	408
5.	Ciberem	288
6.	Gandatapa	697
7.	Karang Cegak	188
8.	Karang Gintung	330
9.	Karang Turi	197
10.	Kawungcarang	79
11.	Kebanggaan	323
12.	Kedungmalang	155
13.	Kotayasa	1082
14.	Limpakuwus	618
15.	Silando	177
16.	Sumbang	479
17.	Susukan	357
18.	Tambaksogra	430
19.	Sikapat	403

Sumber data: SP2d PKH, 2022

Berdasarkan tabel informasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Kecamatan Sumbang tahun 2022 mencapai 7.485 KPM, Kecamatan Sumbang sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di ruang wilayah di Kabupaten Banyumas yang termasuk

dalam penerima program bantuan PKH. KPM PKH terbanyak di Kecamatan Sumbang adalah dari Desa Kotayasa yang mencapai 1082 KPM PKH. Melalui peningkatan jumlah KPM PKH yang terjadi di Desa Kotayasa menjadi titik desa yang diperhatikan dalam pelaksanaan

program keluarga harapan sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Permasalahan pelaksanaan program PKH yang ada di Desa Kotayasa secara umum terjadi adanya beberapa hal maupun faktor yang menyebabkan peningkatan terhadap masalah kemiskinan diantaranya pertama, masih rendahnya jiwa usaha dalam mengembangkan usaha secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan kedepannya. Kedua, kurang sinkronnya data dan belum terdeteksi secara integritasi dengan DTKS sehingga pencairan program bantuan PKH tidak serentak diterima oleh para penerima PKH yang tidak menerima bantuan. Ketiga, masyarakat masih belum sadar dan tidak berani mengambil resiko sehingga masih ketergantungan terhadap bantuan dari PKH.

Pelaksanaan program PKH di desa Kotayasa sejak awal dilakukan memiliki kecenderungan pada data jumlah penerima program PKH disebutkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tentu hal ini menjadi berbanding terbaik dengan harapan maupun tujuan yang akan dicapai dari adanya program PKH yakni menumbuhkan atau meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, berdasarkan kasus yang ada maka dapat disimpulkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Desa Kotayasa hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari program PKH belum dapat tercapai secara optimal dan menemukan kegagalan program yang dijalankan. Adapun model evaluasi yang digunakan dengan pendekatan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), (Stufflebeam, et.al, 1967).

Pertama evaluasi konteks, yaitu

melihat kesesuaian dan tujuan dari pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), Kedua evaluasi masukan, yaitu melihat bagaimana komponen yang ada di dalamnya yang tugas dan fungsi UPPKH, tugas dan fungsi operator PKH, tugas dan fungsi pendamping, serta kepesertaan dalam PKH. Ketiga evaluasi proses, yaitu bagaimana proses program PKH dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan teknis sampai dengan proses pemberian bantuan. Keempat evaluasi hasil, yaitu melihat bagaimana evaluasi hasil ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan terhadap keseluruhan dampak atau manfaat dari suatu program PKH terhadap penerima manfaat yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM) maupun kelompok penerima manfaat (KPM).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode secara kualitatif melalui interaktif (B. Miles et al., 2014) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan ialah pendekatan deskriptif yang berbasis pada proses bentuk evaluasi dalam ini adalah mengenai Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas (B. Miles et al., 2014). Dalam penelitian ini teknik Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Teknik Pemilihan infroman penelitian ini dengan teknik *purpose sampling* (Nathan & Scobell, 2012). Penelitian ini dalam Analisis data menggunakan analisis interaktif (B. Miles et al., 2014) yang mempunyai tujuan dalam menganalisis suatu penelitian pertama dan melakukan

desain ekplanatori untuk menganalisis dalam penelitian kedua (Cresswell&cresswell 2018a). Sasaran informan penelitian ini terdiri berbagai komponenen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta meliputi Unsur Pemerintah Desa Kotayasa, Koordinator PKH Kecamatan Sumbang, Pendamping PKH Desa Kotayasa dan masyarakat penerima bantuan PKH. Pemilihan informan dilakukan dan dipilih secara *purpose sampling* sesuai kebutuhan penelitian yang akan dicapai (Cresswell&Cresswell. 2018a). Dalam penelitian ini Validitasi data menggunakan triangulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&Cresswell. 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Pembahasan mengenai suatu kajian dapat diuraikan secara bertahap melalui suatu pemahaman diperoleh dari suatu permasalahan ataupun perkembangan yang muncul dalam kelompok dengan melakukan menjadi berbagai proses seperti *agenda setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi (Lane1, et. Al. 2017). Dalam melakukan berbagai proses kebijakan diperlukan para aktor publik seperti lembaga pemerintah maupun swasta dan legislatif dalam menetapkan suatu tindakan yang akan dilakukan untuk masyarakat dalam kepentingan secara umum (Anderson, 2017). Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam sistem manajemen untuk menganalisis suatu program mengenai temuan-temuan yang muncul dilapangan (Lang, Jing & Yin, Runsheng. 2019). Hasil temuan penelitian dapat disampaikan secara

terbuka mengenai informasi ataupun data yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari program. Tujuan adanya evaluasi menjadi salah satu proses yang mengarahkan suatu program untuk dilakukan dengan sistematis dan lebih fokus terhadap aspek-aspek dalam suatu program (Lemiaux dan Thomas. 2019). Prosed identifikasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan suatu program yang telah diimplementasikan menjadi salah satu langkah untuk melakukan proses evaluasi terhadap program (Liou, Chiun He. 2020). Penyampaian informasi dalam melakukan proses analisis evaluasi menjadi patokan utama dalam mengambil keputusan untuk menjaga komitmen dan peningkatan pola pikir terhadap pandangan pelaksanaan program. (Mustapha, Rafiu A. 2020).

Secara umum kebijakn yang dibuat oleh pemerintah memiliki nilai-nilai ataupun norma secara transparan dengan adil untuk melakukan proses evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketetapan regulasi dan prosedur yang ada dan tepat target sasaran pada objek program dalam mewujudkan keberhasilan program (Urooj & Parven. 2020). Fokus dalam dari analisis dampak menjadi salah satu solusi alternatif dalam menilai dan memastikan keberhasilan suatu program yang dijalankan dalam sebuah organisasi maupun kelompok yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan secara kuantitatif (Roberts, 2020). Ruang lingkup analisis terhadap program melalui evaluasi kebijakan dapat dilengkapi dengan penilaian-penilaian sebagai jenis seperti penilaian kinerja tingkat efektivitas kebijakan, penilaian pemahaman bersama, , penilaian cepat dan penilaian penerima manfaat, pemantauan indikator, dan

bahkan survei pelacakan pengeluaran publik dalam konteks pengelolaan sektor publik (Abonor & Joy AE. 2020). Evaluasi dapat dijadikan sebagai fungsi pengawasan diluar program yang sangat berpengaruh terhadap kinerja aktor dalam melakukan program terhadap sasaran objek program. Secara umum evolusi dari proses evaluasi dampak melingkupi berbagai informasi dan data dan informasi yang ditemukan dilapangan secara relevan (Michael and Emmanuel, 2020).

Evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan menjadi salah satu tahapan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan program yang sifatnya mengenai kepentingan umum dimasyarakat dengan mengantisipasi berbagai faktor hambatan yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Dengan demikian para pemangku kebijakan ataupun pelaksanaan secara umum mempersiapkan antisipasi faktor hambatan yang dapat mempengaruhi suatu program (Leaung, et al. 2019). Dalam proses evaluasi biasanya dilakukan pada sistem politik Proses evaluasi secara umum tertuju pada sistem politik, akan tetapi perlu adanya pendekatan secara khusus kepada masyarakat dalam segala aspek (Naderi, Samane & Akrami, Azam. 2020). Secara umum yang dilakukan pada kebijakan program melalui analisis evaluasi tertuju pada proses pada *Output* dan *Outcome* dari Program Keluarga Harapan secara komperensif terhadap proses pelaksanaan program PKH dimasyarakat (Nwagboso, Chris. 2019).

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program pemerintah dalam menghadapi masalah yang terus

menerus berkembang secara bertahap dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang mampu mendorong pengurangan angka masalah (Sommers, Benjamin. 2020). Pembahasan mengenai masalah kemiskinan dengan upaya pembelakuan kebijakan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dimasyarakat, akan tetapi dari keseluruhan kebijakan yang ada belum bisa memberikan dampak lebih untuk masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu fenomena bersejarah yang tidak ada hentinya di masyarakat negara indonesia. Adanya masalah kemiskinan menimbulkan dampak bagi masyarakat dalam mengakses aspek aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan dan pencukupan kebutuhan sesuai dengan standart (Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla & Mbabazi Mbabazize. 2019). Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan berbedaan level dan pemenuhan kebutuhannya modal produktif atau asset, sumber keuangan, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Leaung, et al. 2019). Artinya pemerintah secara langsung merespon masalah tersebut untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat melalui perlindungan sosial sebagai langkah dalam menanggulangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat.

Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat menggunakan skema penyaluran sumber daya kebutuhan secara bertahap dengan tujuan meningkatkan standart hidup masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang masih kurang dengan mempertimbangkan target sasaran sesuai

dengan kriteria atau kategori rumah tangga ataupun masyarakat yang masih mengalami kemiskinan (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020). Fokus skema penyerahan bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai keterbelakang dalam memenuhi kebutuhan setaip anggota seperti keluarga yang miskin mempunyai anak, keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia dan memiliki penghasilan yang minim. Secara umum program-program bantuan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan dalam program bansos tidak tergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Secara umum bantuan sosial dapat disalurkan langsung kepada masyarakat yang sifanya mempunyai kerentanan dalam pemenuhan kebutuhan mulai dari bentuk uang, bentuk barang ataupun pelayanan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai wujud perlindungan sosial untuk masyarakat secara umum untuk mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah secara penuh dalam sektor sosial melalui pemberian bantuan sosial secara bersyarat kepada Keluarga yang tergolong dalam kategori Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dimulai dari sejak tahun 2007 sebagai upaya pengembangan sistem perlindungan sosial

dalam lingkup masyarakat. (Kemensos, 2020) berikut gambar yang menunjukkan bahwa PKH berada pada kluster 1 dalam skema kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2. Skema Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan



Sumber: Sahi, Nirmala Afrinti, Taufiqurokhman, And Andriansyah. 2019

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mengadopsi Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfers) yang sudah banyak diterapkan berbagai negara. Landasan hukum PKH adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam penelitian ini, Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 di Desa Kotayasa dianalisis berdasarkan aspek konteks, masukan, proses dan hasil. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu tujuan dari program PKH sudah sesuai dengan tujuan dari pemerintah diantaranya membantu meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan dasar dan

peningkatan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, program PKH sudah selanjutnya dapat dilanjutkan supaya tujuan dari Negara Indonesia dapat segera tercapai. Kebutuhan KPM di Desa Kotayasa khususnya di bidang pendidikan masih kurang dikarenakan ada KPM yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dimana setiap bulannya ada iuran wajib yang harus dibayarkan, sedangkan kebutuhan di bidang kesehatan para KPM sudah merasa tercukupi karena mereka dapat berobat secara gratis di faskes yang telah ditentukan.

Respon penerima bantuan terhadap program yaitu menerima kehadiran program PKH dan mereka merasa senang karena dapat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal penyaluran bantuan masih mengalami kendala yaitu pada saat penyaluran dana bantuan dari pusat kadang belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi secara keseluruhan proses penyaluran dana bantuan PKH di Desa Kotayasa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis peneliti dan wawancara secara mendalam terkait komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH di Desa Kotayasa dapat diketahui secara keseluruhan komitmen dan pola pikir peserta PKH harus didukung dengan sikap produktif secara sosial dan ekonomi.

Adapun model evaluasi yang digunakan terkait dengan evaluasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Kotayasa yaitu model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), (Stufflebeam, et.al, 1967).

Pertama evaluasi konteks, yaitu melihat kesesuaian dan tujuan dari pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), Kedua

evaluasi masukan, yaitu melihat bagaimana komponen yang ada di dalamnya yang tugas dan fungsi UPPKH, tugas dan fungsi operator PKH, tugas dan fungsi pendamping, serta kepesertaan dalam PKH. Ketiga evaluasi proses, yaitu bagaimana proses program PKH dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan teknis sampai dengan proses pemberian bantuan. Keempat evaluasi hasil, yaitu melihat bagaimana evaluasi hasil ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan terhadap keseluruhan dampak atau manfaat dari suatu program PKH terhadap penerima manfaat yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM) maupun kelompok penerima manfaat (KPM).

a. Evaluasi Konteks

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk menganalisis evaluasi konteks yaitu dengan melihat komponen dan aspek yang ada di dalamnya pertama yaitu tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) apakah sudah sesuai dengan tujuan, kedua dari kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program PKH diantaranya kebutuhan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan dan social ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek evaluasi konteks ini peneliti menemukan bahwa dilihat dari sisi tujuan program, pelaksanaan program PKH di Desa Kotayasa sudah sesuai karena program PKH yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan taraf hidup baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan, menciptakan perubahan perilaku (*mindset*) dan kemandirian KPM agar terbangun sikap hidup yang lebih produktif dan berdaya secara sosial dan ekonomi secara

berkelanjutan. Saat ini sebgaiian besar para penerima manfaat dari PKH mulai dilatih untuk mengembangkan berbagai usaha agar bantuan yang diberikan berubah dari pola komsumtif menjadi pola produktif.

Para pendamping juga sangat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya perubahan pola hidup masyarakat para penerima manfaat. Meskipun juga masih ditemukan dari para penerima manfaat PKH masih bersikap kurang respon terkait dengan kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi. Merka masih menganggap tidak perlu dan cukup mengangdalkan bantuan PKH yang diterimanya selama ini, kondisi seperti ini yang menjadi salah satu faktor program PKH terus meningkat setiap tahunnya. Sebgaiian masyarakat penerima manfaat masih belum bisa merubah pola pikir dan pola hidup untuk jangka panjang.

Selain pola ekonomi yang dibangun, dalam pelaksanaan PKH di Desa Kotayasa ini juga berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, terutama anak-anak dari para penerima manfaat PKH. Beberapa kelompok peneriman manfaat PKH yang terpaksa harus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dimana setiap bulannya ada iuran bulanan yang harus dibayarkan. Sedangkan pada bidang kesehatan para KPM sudah merasa tercukupi, dan sangat terbantu karena ketika sakit para KPM dapat berobat secara gratis di faskes yang sudah ditetapkan. Artinya, pelaksanaan program PKH di Desa Kotayasa sudah mampu memberikan akses yang baik bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sedangkan untuk aspek perbaikan ekonomi masih terus dilaksanakan untuk bisa secara bertahap membangun kemandirian ekonomi

masyarakat dan secara bertahap merubah pola pikir masyarakat untuk lebih bisa produktif dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH).

b. Evaluasi Masukan

Pada aspek evaluasi masukan untuk melihatnya menggunakan beberapa komponen ataupun sub aspek yang ada didalam suatu program PKH yang dilaksanakan di Desa Kotayasa kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Berikut analisisnya mengenai aspek :

- 1) Tugas dan fungsi UPPKH. Pelaksanaan Program PKH yang dilakukan di Desa Kotayasa kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan dan secara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PKH setiap kali dilakukan.
- 2) Tugas dan fungsi operator PKH. Pengelolaan terhadap data menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan seiring dengan banyaknya masyarakat yang mendapatkan program Keluarga harapan. Hal ini menjadi pelaporan tahunan yang dilakukan oleh dapat dilakukan oleh operator PKH sebagai wujud penugasannya.
- 3) Tugas dan fungsi pendamping PKH. dalam pelaksanaan program tugas dan fungsi pendamping PKH untuk kelompok masyarakat untuk mendampingi pemanfaatan bantuan PKH agar dapat terkontrol dan memonitoring proses berjalannya PKH untuk mencapai suatu tujuan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Perlu adanya sosialisasi mengenai pengembangan pemanfaatan bantuan PKH untuk merintis pembangunan ekonomi dalam

segala bidang, yang nantinya dapat memberikan dorongan pada kemajuan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum Pelaksanaan pendampingan PKH dapat dilakukan rutin setiap bulannya yang diikuti oleh seluruh keluarga penerima dalam pertemuan terakhir, akan tetapi pendampingan PKH sempat terhambat dengan adanya pandemi covid-19 sehingga diharuskan untuk tidak melakukan pertemuan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat. Secara umum dengan adanya program ini mayoritas masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Evaluasi Proses

Dalam menganalisis evaluasi program dapat dilakukan dengan aspek evaluasi proses dalam pelaksanaan bantuan PKH dimasyarakat yang dilakukan oleh pendamping dan KPM di dalam program. Untuk menganalisis evaluasi proses tersebut dapat dilakukan melalui komponen-komponen yang ada didalam program seperti:

1) Sosialisasi pelaksanaan PKH

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara rutin yang disertai dengan pendampingan untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan bantuan PKH dapat berjalan sesuai dengan procedural dan selalu dilaksanakan pengawasan dan monitoring oleh para pendamping PKH.

2) Proses pendampingan dalam PKH

Proses pendampingan PKH dilakukan bersama kelompok penerima manfaat sebagai fungsi media pengarah dan mengedukasi masyarakat pemanfaatan dan pembinaan terhadap penggunaan bantuan yang diperolehnya untuk kepentingan keluarga yang dikelola secara efektif dan efisien.

3) Pengelolaan data PKH

Pengelolaan data KPM PKH masih dalam kondisi belum terupdate sehingga masih kurang sinkron terhadap kondisi data dilapangan yang mengakibatkan para penerima bantuan belum bisa menerima sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga perlu adanya pemutakhiran data yang terbaru untuk memperoleh informasi mengenai kelompok penerima manfaat pada program keluarga harapan.

4) Penuhan komitmen peserta PKH

Menganai penuhan komitmen peserta PKH para KPM secara umum mampu menjalankan hak dan kewajiban salah satunya melakukan pertemuan secara rutin, menghadiri sosialisasi dan agenda-agenda lainnya mengenai pembahasan program keluarga harapan secara luas

Secara umum proses pelaksanaan program PKH di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ada beberapa hal yang masih harus perlu menjadi perhatian seperti pada pendampingan, sosialisasi dan edukasi, komitmen KPM dapat berjalan dengan efektif dan efisien dimasyarakat. Adanya Pendamping program untuk masyarakat menjadi salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dilapangan.

d. Evaluasi Hasil

Dalam menganalisa program keluarga harapan melalui aspek evaluasi hasil untuk menindaklanjuti informasi maupun fakta yang ditemukan untuk dasar mengambil keputusan. Evaluasi hasil umumnya digunakan untuk mengarahkan suatu program yang dilaksanakan agar dapat mencapai hasil dari tujuan program PKH terhadap RTSM/KPM. Untuk

menganalisis evaluasi hasil ini diperlukan berbagai komponen-komponen yang ada didalamnya seperti:

1) Komitmen dan Perubahan Pola Pikir (*mindset*) Peserta PKH

Terbentuknya sikap komitmen dan pemahaman terhadap pola pikir peserta PKH mengenai tujuan dari program dapat mendorong dan membantu mewujudkan capaian suatu hasil yang diharapkan dari adanya program. Pergerakan yang meningkat akan membawa perubahan yang besar terhadap kemajuan masyarakat dalam berfikir dan bertindak seiring dengan perkembangan yang sulit dihadapi. Melalui program PKH memberikan dorongan bagi masyarakat untuk senantiasa berusaha keluar dari masalah kemiskinan dan menciptakan komitmen terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

2) Tertib Administrasi Data PKH

Tertibnya administrasi data peserta PKH menjadi langkah pengelolaan program dapat berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan. Data administrasi menjadi hal penting untuk memantau perkembangan pelaksanaan program dan sebagai sumber informasi dan fakta sebagai langkah kedepan bagi pemerintah dalam bertindak mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat umum. dengan kondisi kelompok penerima masyarakat dalam program PKH.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum dapat membantu kebutuhan baik bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan maupun bidang kesehatan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Evaluasi yang dilakukan bertujuan dapat memberikan pandangan masyarakat untuk terus berusaha meningkatkan khususnya dalam sektor ekonomi yaitu mencapai titik kesejahteraan secara mandiri di masyarakat. Adanya proses evaluasi program PKH ini perlu dilakukan pemutakhiran data agar program PKH ini sesuai dan tujuan dan tepat sasaran untuk masyarakat miskin.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, maka dapat diperoleh kesimpulan menjadi empat komponen yakni, evaluasi *context* (konteks) yang selama ini berjalan terkait dengan teknis aturan harus lebih di tingkatkan pengawasan oleh para pendamping agar mampu mencapai kebutuhan yang sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan, materi modul sehingga mayoritas KPM sudah mengetahui mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki tujuan program kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi *input* (masukan) harus mampu melaksanakan monitoring dan pembinaan bagi para kelompok penerima manfaat agar mampu membangun pola hidup yang produktif, Evaluasi *process* (proses) dan Evaluasi *product* (hasil) selama ini yang berjalan masih harus ditingkatkan dengan upaya pelatihan dan ketrampilan agar para kelompok penerima manfaat lebih berdaya dalam hal sosial dan ekonomi. Selanjutnya perlu adanya pelaksanaan pemutakhiran data secara berkala, karena masih ada

penerima bantuan PKH yang menerima bantuan belum sesuai dengan kondisi terkini, dan masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari PKH, pendamping PKH perlu mengedukasi kembali masyarakat terkait dengan pendidikan kewirausahaan dan pola hidup yang lebih produktif untuk mencapai masyarakat yang mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aiafi, Patoae Roberts, 2020. *"The Nature of Public Policy Processes in The Pasific Island"*, Asia & The Pasific Public Studies. Vol 4, No.3, Pp 451-466
- Ali, Huma, Urooj Islam, & Shabnan Parven. 2020. *"Impact of Green Human Resource Management Practices on Job Seekers' Attraction"*, Journal of Resources Development and Management, Vol 38, No.1, Pp 26 -32
- Andersson Annika Lantz et.al. 2015. What's the problem? Meaning making and learning to do mathematical word problems in the context of digital tools Annika. Published online: 25 January 2008. Department of Education, LinCS, Goteborg University, 300, 405 30 Goteborg, Sweden.
- Augustine, E Bassey, Lazarus B, Abonor & Joy AE. 2020. *"The Impact of Female Genital Mutilation (FGM) on Hemorrhage During Child Birth Among Rural Women of Cross River State"*, Information and Knowledge Management, Vol 7, No.11, Pp 1 – 13
- Babatunde, Binoyo. 2019. *"Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics Development Evidence from Nigeria."* *Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter)*, Vol 4, No 1, Pp 26 -37
- Baghebo, Michael & Nathan, Emmanuel. 2019. *"The Impact of Poverty Alleviation Programmes on Economic Growth in Nigeria 1981 – 2013"*. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No 10 Pp 177 – 188
- Creswell, R. 2019. *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*, "Sage Journal"
- Derrick and White, P. 2020. *Comparing two samples from an individual Likert question.* "International Journal of Mathematics and Statistics", 18 (3).
- Declan. 2020. *Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire Compared to Calibrated Accelerometer cut off points in the Quantifications of Sedentary Behaviour and Physical activity in Older Adults."* *Journal PONE*", Vol 1 No 9
- Karimi, Milad & Brazier, John. 2020. *"Health, Health-Related Quality of Life, and Quality of Life: What is the Difference?"*. *The Journal of Applied Laboratory Medicine*. Pp 1-9
- Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla & Mbabazi Mbabazize. 2019. *Effect of Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda*, "

- The International Journal Of Business & Management*”, Vol 4 No 4
- Korankye, Alex Adde. 2019. "Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature." *American International Journal of Social Science*, Vol. 3, No.7, Pp 147 - 153
- Kwong, Yan Wai. 2019. "A Review of the Impacts of Agenda-sett." *Journal of Communication and Education.* Vol 2, No.2
- Lang, Jing & Yin, Runsheng. 2019. "Research Trends : Policy Impact Evaluation, Future Contributions From Economics", *Journal Policy and Economics*, Vol 8, No.2, Pp 142-145
- Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe. (2017). Non-profit organizations in public policy implementation. *Journal of public administration and policy research* Vol. 1(7) pp. 141-149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.
- Lemiaux, Thomas. 2019. "Inneffective Effect of Social Assistance : A Regression Discontinuity Approach." *Journal Of Econometric*
- Leung, et al. 2019. "Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California". *American Journal of Public Health*, Vol 105, No.8
- Leung, Lawrence. 2019. *Validity, Reliability and Generalizability in Qualitative Research. " Research and audit Journal "*, Vol 4 Issue 3
- Liou, Chiun He. 2020. "Child Poverty and its Impacts on Social Exclusion in Taiwan." *Journal of Asian Public Policy*, Vol 10, No.12
- Morgan, D. L. 2017. Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. In *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach.* <https://doi.org/10.4135/9781544304533>
- Mustapha, Rafiu A. 2020. "Impact of poverty reduction program of the kwara state government of nigeria on the beneficiaries". *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, Vol 5, No.3, March 2017, Pp 247 – 262
- Nathan, A. J., & Scobell, A. 2019. Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5).
- Naderi, Samane & Akrami, Azam. 2020. *EFL Learners' Reading Comprehension Development through MALL:Telegram Groups in Focus,* " *International Journal of Instruction*", Vol 1 No 2 Pp 339 - 350
- Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020. "Poverty Reduction for Sustainable Development: Malaysia's Evidence-Based Solutions". *Global Journal of Social Sciences Studies*, Vol. 3, No. 1, Pp 29 – 42.
- Nwagboso, Chris. 2019. "Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in the Third World ". *British Journal of Humanities and Social Sciences* Vol 5, No.1, Pp 59-76
- Sommers, Benjamin. 2020. *Health Insurance Coverage and Health*

- What the Recent Evidence Tell Us”*
The New England Journal of Medicine, Vol 20
- Theofilau, Paraskevi. 2019. “*Quality of Life: Definition and Measurement*.” *Europe’s Journal of Psychology* , Vol 9 Issue 1, Pp 150 – 163.
- Wilson, Ron & Brend De Mast. 2019. “*Housing Programs, Assisted Populations, and Crime: Guest Editors’ Introduction*”. *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research*, Vol 15, No. 3
- Yu, Stan & McLaughlin, Darrell Arthur. 2019. “*Program Evaluation and Impact Assessment in International Non Governmental organizations (INGOs) : Exploring Rules, Benefits, and Challenges*”. *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research*, Vol 4, No.2, Pp 23-36